

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2015-2019
(Berdasarkan Usulan DPD)

Keterangan	
B/L	Baru/Lama (Prolegnas 2010-2014)
L-U	Lama dan diundangkan pada Prolegnas 2010-2014
DK	Deskripsi Konsepsi
Kip	Kelengkapan Kesiapan 4 : Ada NA dan Draft RUU 5 : Ada NA atau Draft RUU 6 : Baru Judul
	Prolegnas Prioritas 2015

NO	PROLEGNAS 2015-2019	Posisi 2009 - 2014	PENGUSUL	LINGKUP BIDANG PENUGASAN	STATUS RUU	KELENGKAPAN DATA		SARAN TIM PENDUKUNG PENYUSUNAN PROLEGNAS
			DPD		B/L	DK	Kip	
1	RUU tentang Pertanahan	Tk.I - Usul DPR	DPD	Komite I	L	-	-	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015 dengan melihat perkembangan pembahasan pada periode sebelumnya. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
2	RUU tentang Konvergensi Telekomunikasi	-	DPD	Komite I	B	-	-	-
3	RUU tentang Jasa Lingkungan	-	DPD	Komite II	B	-	-	-
4	RUU tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan	-	DPD	Komite II	B	-	-	-
5	RUU tentang Ekonomi Kreatif	-	DPD	Komite III	B	-	-	-
6	RUU tentang Perlindungan Bahasa dan Kesenian Daerah	-	DPD	Komite III	B	-	-	-
7	RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	DPD	Komite IV	B	-	-	-
8	RUU tentang Perkoperasian	-	DPD	Komite IV	B	-	-	-
9	RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	-	DPD	PPUU	B	-	-	-
10	RUU tentang Wawasan Nusantara	-	DPD	PPUU	B	-	-	-
11	RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	-	DPD	Pansus dengan Koordinator Komite I & Komite IV	B	-	-	-
12	RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Alternatif RUU DPD sendiri. Karena DPRD sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014)	-	DPD	Pansus dengan Koordinator PPUU	B	-	-	-

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2015-2019
(Berdasarkan Usulan Komisi, Fraksi, dan Masyarakat)

Keterangan	
B/L	Baru/Lama (Prolegnas 2010-2014)
L-U	Lama dan diundangkan pada Prolegnas 2010-2014
DK	Deskripsi Konsepsi
Klp	Kelengkapan Kesiapan 4 : Ada NA dan Draft RUU 5 : Ada NA atau Draft RUU 6 : Baru Judul
	Prolegnas Prioritas 2015

NO	PROLEGNAS 2015-2019	Posisi 2009 - 2014	PENGUSUL			LINGKUP BIDANG PENUGASAN	STATUS RUU B/L	KELENGKAPAN DATA		SARAN TIM PENDUKUNG PENYUSUNAN PROLEGNAS
			KOMISI	FRAKSI	MASYARAKAT			DK	Klp	
1	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Tk. I - Usul DPR	Komisi I		Selain diusulkan oleh Komisi I, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi I	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015 dengan melihat perkembangan pembahasan pada periode sebelumnya. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
2	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	Usul DPR	Komisi I		Selain diusulkan oleh Komisi I, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi I	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015, karena pada periode keanggotaan 2009-2014 sudah ditetapkan menjadi Usul DPR. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
3	RUU tentang Persandian dan Intersepsi	-	Komisi I			Komisi I	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam daftar Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman	-	Komisi I			Komisi I	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam daftar Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	-	Komisi I			Komisi I	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam daftar Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)

6	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi I			Komisi I	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
7	RUU tentang Konvergensi Media (termasuk didalamnya mengenai internet)	-	Komisi I			Komisi I	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. <i>Konvergensi Media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu tujuan.</i> Komisi I mengharapkan menjadi usulan Pemerintah.
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi I			Komisi I	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Komisi I mengharapkan menjadi usulan Pemerintah
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	-	Komisi I			Komisi I	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
10	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Tk.I - Usul DPR	Komisi I		Selain diusulkan oleh Komisi I, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi I	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran) Komisi I mengharapkan menjadi usulan Pemerintah
11	RUU tentang Rahasia Negara	Tk.I - Usul DPR	Komisi I		Selain diusulkan oleh Komisi I, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi I	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
12	RUU tentang Keamanan Nasional	Tk.I - Usul DPR			RUU ini diusulkan oleh KomNasHAM dan Komisi Hukum Nasional	Komisi I	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
13	RUU tentang Pertanahan	Tk.I - Usul DPR	Komisi II		Selain diusulkan oleh Komisi II, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi II	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015 dengan melihat perkembangan pembahasan pada periode sebelumnya. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)

14	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara	Usul DPR	Komisi II		Selain diusulkan oleh Komisi II, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi II	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
15	RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	Tk.I - Usul Pemerintah	Komisi II, Komisi XI			Komisi II, Komisi XI	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
16	RUU tentang Perubahan atas UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi II			Komisi II	L	Ada	4	
17	RUU tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	-	Komisi II		Selain diusulkan oleh Komisi II, RUU ini juga diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia	Komisi II	L-U	Ada	6	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan serentak tahun 2019 antara Pemilu anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
18	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	-	Komisi II			Komisi II	L-U	Ada	6	
19	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Tk.I - Usul Pemerintah	Komisi III	F-PPP	Selain diusulkan oleh Komisi III, RUU ini juga diusulkan oleh Komnas Perempuan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, KomNashAM, Komisi Hukum Nasional	Komisi III	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015 dengan melihat perkembangan pembahasan pada periode sebelumnya. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)

20	RUU tentang Hukum Acara Pidana	TK.I - Usul Pemerintah	Komisi III	F-PPP	Selain diusulkan oleh Komisi III, RUU ini juga diusulkan oleh Komnas Perempuan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, KomNashAM, Komisi Hukum Nasional	Komisi III	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015 dengan melihat perkembangan pembahasan pada periode sebelumnya. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
21	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Usul DPR	Komisi III	F-PPP	Selain diusulkan oleh Komisi III, RUU ini juga diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, KomNashAM, Komisi Hukum Nasional	Komisi III	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
22	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	-	Komisi III			Komisi III	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	-	Komisi III			Komisi III	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
24	RUU tentang Mahkamah Agung	Tk.I - Usul DPR	Komisi III	F-PPP	Selain diusulkan oleh Komisi III, RUU ini juga diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Komisi Hukum Nasional	Komisi III	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
25	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	Tk.I - Usul DPR	Komisi III	F-PPP	Selain diusulkan oleh Komisi III, RUU ini juga diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Komisi Hukum Nasional	Komisi III	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)

26	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	-	Komisi III			Komisi III	L-U	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
27	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI	Penyusunan AKD	Komisi III		Selain diusulkan oleh Komisi III, RUU ini juga diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Komisi Hukum Nasional	Komisi III	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
28	RUU tentang Badan Nasional Pemberantasan Terorisme	Penyusunan AKD	Komisi III			Komisi III	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	-	Komisi IV			Komisi IV	B	Ada	6	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015, berdasarkan hasil keputusan rapat internal Komisi IV. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
30	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	-	Komisi IV			Komisi IV	B	Ada	6	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015, berdasarkan hasil keputusan rapat internal Komisi IV. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
31	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	-	Komisi IV			Komisi IV	B	Ada	6	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015, berdasarkan hasil keputusan rapat internal Komisi IV. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
32	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IV			Komisi IV	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
33	RUU tentang Pertanian	-	Komisi IV			Komisi IV	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)

34	RUU tentang Jasa Lingkungan dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan	-	Komisi IV			Komisi IV	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. RUU tentang Jasa Lingkungan dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dapat saja Judulnya RUU tentang Jasa Lingkungan tanpa Pinjam Pakai Kawasan Hutan, karena Pinjam Pakai Kawasan Hutan dapat masuk ke dalam substansi RUU tentang Perubahan UU Kehutanan (no.43);
35	RUU tentang Sumber Daya Genetik	-	Komisi IV			Komisi IV	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019.
36	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IV			Komisi IV	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
37	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IV			Komisi IV	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Undang-Undang tentang Kehutanan, perlu disesuaikan dengan: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
38	RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kelautan	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IV			Komisi IV	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Substansinya dapat berkaitan dengan RUU tentang Pertanian (no. 39).

39	RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IV			Komisi IV	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Pengaturan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terkait dengan: 1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
40	RUU tentang Pengelolaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IV			Komisi IV	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Substansinya dapat berkaitan dengan RUU tentang Pertanian (no. 39) dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
41	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IV			Komisi IV	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
42	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IV			Komisi IV	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. <u>Pasal 125 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa "ketentuan mengenai Bagi Hasil Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri."</u>
43	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 Penetapan Luas Lahan Pertanian	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IV			Komisi IV	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Substansinya dapat berkaitan dengan RUU tentang Pertanian (no. 39).

44	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	Tk.1 - Usul DPR			Pada Periode 2009-2014 diusulkan oleh Badan Legislasi. RUU ini diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, KomNasHAM, dan Komisi Hukum Nasional	Komisi IV, Komisi II, Komisi III, Komisi VIII	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
45	RUU tentang Arsitek	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi V			Komisi V	L	Ada	6	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
46	RUU tentang Jasa Konstruksi	Harmonisasi di Baleg	Komisi V		Selain diusulkan oleh Komisi V, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi V	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
47	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi V			Komisi V	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
48	RUU tentang Jalan	Tk. 1- Usul DPR	Komisi V		Selain diusulkan oleh Komisi V, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi V	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
49	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tk. 1	Komisi V			Komisi V	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
50	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Tk.1- Usul DPR	Komisi V		Selain diusulkan oleh Komisi V, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi V	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)

51	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	Tk.1- Usul DPR	Komisi V		Selain diusulkan oleh Komisi V, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi V	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
52	RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN	Penyusunan AKD	Komisi VI		Selain diusulkan oleh Komisi VI, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi VI	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
53	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Penyusunan AKD	Komisi VI		Selain diusulkan oleh Komisi VI, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi VI	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
54	RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	-	Komisi VI			Komisi VI	L-U	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019, karena Undang-Undang Perkoperasian dinyatakan dicabut atau tidak berlaku berdasarkan Putusan MK atas pengujian terhadap Undang-Undang Perkoperasian (Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013). Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
55	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Harmonisasi di Baleg	Komisi VII		Selain diusulkan oleh Komisi VII, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi VII	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
56	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi VII			Komisi VII	L	Ada	6	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
57	RUU tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri	-	Komisi VII			Komisi VII	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. RUU Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.

58	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi VII			Komisi VII	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
59	RUU tentang Pengembangan Energi dan Terbarukan	-	Komisi VII			Komisi VII	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. RUU ini berkaitan dengan UU No. 30 Tahun 2001 tentang Energi. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
60	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi VII			Komisi VII	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
61	RUU tentang Geologi	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi VII			Komisi VII	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
62	RUU tentang Konservasi Danau, Tanah, dan Air	-	Komisi VII			Komisi VII	B	Ada	6	RUU ini terkait dengan UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air.
63	RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	-	Komisi VII			Komisi VII	L-U	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Dikaitkan dengan kabinet saat ini, RUU ini dapat menjadi prioritas di Tahun 2015. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis. Pada Prolegnas sebelumnya judul RUU ini adalah: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

64	RUU tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan	-	Komisi VII			Komisi VII	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Pengaturan tentang Penelitian terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
65	RUU tentang Penyandang Disabilitas	Usul DPR	Komisi VIII		Selain diusulkan oleh Komisi VIII, RUU ini juga diusulkan oleh KomNasHAM dan Komisi Hukum Nasional	Komisi VIII	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran).
66	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	Tk. 1- Usul DPR	Komisi VIII	F-PPP	Selain diusulkan oleh Komisi VIII, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi VIII	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
67	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	-	Komisi VIII			Komisi VIII	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
68	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	-	Komisi VIII			Komisi VIII	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
69	RUU tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Agama	-	Komisi VIII			Komisi VIII	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. RUU ini berkaitan dengan UU Pendidikan Tinggi. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
70	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Tk. 1- Usul DPR	Komisi IX		Selain diusulkan oleh Komisi IX, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi IX	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)

71	RUU tentang Kebidanan	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IX			Komisi IX	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
72	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Tk. 1- Usul DPR	Komisi IX		Selain diusulkan oleh Komisi IX, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi IX	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
73	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	Penyusunan AKD	Komisi IX		Selain diusulkan oleh Komisi IX, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi IX	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
74	RUU tentang Praktik Kefarmasian	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi IX			Komisi IX	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
75	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	-	Komisi IX			Komisi IX	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Substansi RUU terkait dengan RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
76	RUU tentang Kebudayaan	Tk. 1- Usul DPR	Komisi X	F-PPP	Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi X	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
77	RUU tentang Sistem Perbukuan	Tk. 1- Usul DPR	Komisi X	F-PPP	Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi X	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
78	RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus	Penyusunan AKD	Komisi X	F-PPP	Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi X	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)

79	RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi X			Komisi X	L	Ada	6	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
80	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi X			Komisi X	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
81	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	Tk.I - Usul Pemerintah	Komisi XI		Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi XI	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
82	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Usul DPR	Komisi XI		Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi XI	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
83	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)	Tk.I - Usul Pemerintah	Komisi XI		Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi XI	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem Nilai Tukar	Penyusunan AKD	Komisi XI		Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi XI	L	Ada	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
85	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi XI		Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi XI	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019, karena penyesuaian dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
86	RUU tentang Bank Indonesia	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi XI			Komisi XI	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019, karena penyesuaian dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.

87	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi XI			Komisi XI	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019, karena penyesuaian dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
88	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi XI			Komisi XI	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019, karena penyesuaian dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
89	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	Tk.I - Usul Pemerintah	Komisi XI		Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi XI	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
90	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Tk. 1- Usul DPR	Komisi XI		Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi XI	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
91	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Penyusunan AKD	Komisi XI		Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi XI	L	Ada	4	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Keterangan lengkap ada pada deskripsi konsepsi (Lampiran)
92	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi XI		Selain diusulkan oleh Komisi X, RUU ini juga diusulkan oleh Komisi Hukum Nasional	Komisi XI	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
93	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi XI			Komisi VI	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.

94	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi XI			Komisi XI	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
95	RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas	Komisi XI			Komisi XI	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
96	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	-			Komnas Perempuan	Komisj III, Komisi VIII	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019.
97	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas			Komnas Perempuan	Komisi III	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan oleh Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006. Pada Periode Prolegnas 2010-2014 judul RUU dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2011 sebagai usul Pemerintah.
98	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas			Komnas Perempuan	Komisi III	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019.
99	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas			Pusat Studi Hukum dan Kebijakan	Komisi III	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019.
100	RUU tentang Perkumpulan	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas			Pusat Studi Hukum dan Kebijakan	Komisi III	L	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Pada Periode Prolegnas 2010-2014 Merupakan RUU usulan dari Pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2011. Usulan masyarakat untuk menggantikan UU Ormas
101	RUU tentang Anti Penyiksaan	-			KomNashAM	Komisi III	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019.
102	RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai	Masuk Prolegnas tetapi belum pernah dibahas			Pusat Studi Hukum dan Kebijakan	Komisi XI	B	Ada	6	Dapat diusulkan dalam Prolegnas 5 tahunan masa keanggotaan 2014-2019. Draft NA dan RUU sebaiknya disusun oleh Pemerintah karena substansinya lebih bersifat teknis.
103	RUU Penjaminan			F-Partai Golkar			B	-	6	-

104	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol			F-PPP			L	-	4	Dapat diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015. Pada periode keanggotaan 2009-2014 sudah dalam tahap Pembicaraan Tk. I
105	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Tk. I - Usul DPR		F-PPP		Komisi III	L	Ada	4	
106	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan			F-PPP			B	-	6	
107	RUU tentang Pendidikan Pesantren			F-PPP			B	-	6	
108	RUU tentang Pendidikan Madrasah Diniyah			F-PPP			B	-	6	
109	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	-			Pusat Studi Hukum dan Kebijakan		B	-	6	

RUU Kumulatif Terbuka

A	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional									
1	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Person from Enforced Disappearances)	Tk. I - Usul Pemerintah								RUU tidak diselesaikan mengingat sampai dengan akhir Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014, Fraksi-fraksi masih melakukan pendalaman terhadap RUU tersebut, untuk itu Komisi I DPR RI belum dapat mengadakan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tersebut.
2	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan.	Tk. I - Usul Pemerintah								
3	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di bidang Pertahanan	Tk. I - Usul Pemerintah								

REKAPITULASI:

1. Jumlah RUU Prolegnas 2015-2019 : 109 RUU

Usul DPR: 93

Komisi I: 11 RUU

Komisi II: 6 RUU

Komisi III: 10 RUU

Komisi IV: 15 RUU

Komisi V: 7 RUU

Komisi VI: 3 RUU

Komisi VII: 10 RUU

Komisi VIII: 5 RUU

Komisi IX: 6 RUU

Komisi X: 5 RUU

Komisi XI: 15 RUU

Usul Fraksi: 6 RUU

F-Partai Golkar: 1 RUU

F-PPP: 5 RUU

Usul Masyarakat: 10 RUU

2. RUU sudah Pembicaraan Tk I dan sudah menjadi Usul DPR pada periode 2009-2014 tetapi tidak diusulkan kembali: 5 RUU

3. RUU Prolegnas 2015-2019 Usulan Masyarakat : 62 RUU

Komisi Hukum Nasional: 38

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan: 12

Komisi Nasional HAM: 7

Komisi Nasional Perempuan: 5

4. Jumlah RUU Prioritas 2015: 29 RUU

Komisi I: 2 RUU

Komisi II: 5 RUU

Komisi III: 3 RUU

Komisi IV: 3 RUU

Komisi V: 2 RUU

Komisi VI: 2 RUU

Komisi VII: 2 RUU

Komisi VIII: 2 RUU

Komisi IX: 2 RUU

Komisi X: 3 RUU

Komisi XI: 3 RUU

5. Jumlah RUU Kumulatif: 94

a. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional: 5 RUU

b. RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

c. RUU APBN

d. RUU tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota: 87 RUU

e. RUU tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 2 RUU

4	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam</i>)	Tk. I - Usul Pemerintah								
5	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea</i>)	Tk. I - Usul Pemerintah								
B	RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi									
C	RUU APBN									
D	RUU tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota									
1	RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru	Tk. I - Usul DPR	Komisi II			DPR/ PEMERINTAH	L	Ada	4	87 RUU dalam Pembicaraan Tk. I
E	RUU tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang									
1	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	-	Komisi II			DPR/ PEMERINTAH	B	Ada	6	RUU ini sudah disetujui menjadi UU pada rapat Paripurna tgl 20 Januari 2015.
2	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU	-	Komisi II			DPR/ PEMERINTAH	B	Ada	6	RUU ini sudah disetujui menjadi UU pada rapat Paripurna tgl 20 Januari 2015.

RUU Usul Inisiatif Anggota DPR										Dapat diusulkan 25 RUU per tahun.
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

RUU sudah Pembicaraan Tk I dan sudah menjadi Usul DPR pada periode 2009-2014										
1	RUU tentang Kepalangmerahan	Tk. I - Usul DPR				Komisi X	L	Ada	4	
2	RUU tentang Pertembakauan	Tk. I - Usul DPR				-	L	Ada	4	
3	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.	Usul DPR				Komisi VIII	L	Ada	4	